



PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN PASER



LKjIP

TAHUN
2023

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)

TAHUN
2023

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023** Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Kegiatan LKjIP ini memiliki misi untuk mendukung program pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan serta sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser atas pelaksana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 yang meliputi program-program dan kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2023.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka disusunlah laporan ini dan kepada semua pihak yang telah berperan secara aktif di dalam mendukung penyusunan pelaksanaan kegiatan LKjIP ini diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khusus kami haturkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Paser yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Disadari sepenuhnya LKjIP ini masih banyak kekurangan. Meskipun demikian kami harap LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Tanah Grogot, Februari 2024
Kepala Dinas,



Dr. Eryan Wahyudi, SP M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19781230 200801 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik ke arah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

Penyusunan LKjIP ini berbeda dengan Laporan Tahunan yang konvensional, karena memuat kebijaksanaan serta nilai capai indikator, yang berdasarkan dokumen Renstra.

LKjIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser memuat 5 (lima) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan utama (Skala Prioritas) serta 28 (Dua puluh delapan), dengan presentase pelaksana rata-rata **94,54%** atau **berhasil**, walau ada pula kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan baik sebagian atau keseluruhan.

DAFTAR ISI

	<i>BAB/Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
A. Latar Belakang	I – 1
B. Gambaran Umum	I – 2
C. Keadaan Umum Wilayah	I – 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II – 8
A. Rencana Strategis	II - 8
- Sasaran	II - 9
- Strategi Dan Kebijakan	II - 10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	II - 13
C. PERJANJIAN KINERJA	II –13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III – 15
A. CAPAIAN KINERJA	III – 15
- Pengukuran kinerja	III – 15
- Analisis Capaian Kinerja	III – 21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	
ANGGARAN	III – 31
- Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja	III – 31
- Akuntabilitas Keuangan	III – 32
BAB IV. PENUTUP	IV –37

DAFTAR TABEL

Tubuh Utama

<i>Nomor</i>		<i>BAB/Halaman</i>
1.	Susunan kepegawaian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2022	I – 3
2.	Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana	I - 4
3.	Realisasi Anggaran berdasarkan program dan kegiatan	II – 32

DAFTAR LAMPIRAN

Tubuh Utama

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
2.	Pengukuran Kinerja Kegiatan 2023	71
3.	Rencana Aksi tahun 2023	77
4.	SOP LkjIP	80
5.	Indikator Utama Kerja	84
6.	SK Tim Penyusunan Laporan kinerja	85

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Pripinsi dan Nasional.

2. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023, tentang susunan Organisasi dan Tupoksi dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang serta seluruh elemen dinas harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

2.1. Sumberdaya Manusia Dinas

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai

personil sebanyak 161 orang terdiri dari 8 pejabat struktural, 79 orang staf, PPPK 30 orang dan 44 orang pegawai honorer. Dari jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dirinci menurut golongan sebagai berikut.

Tabel 1

Susunan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2023

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI PNS GOLONGAN				JUM LAH	JABATAN STRUKTURAL		
		IV	III	II	I		II	III	IV
1	S3	1				1			5
2	S2	7				7			5
3	S1		38			38		2	
4	DIPLOMA			2		2			
5	SLTA			30		30		1	
6	SLTP			1		1			
JUMLAH		8	38	33		79		3	5

2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventarisasi kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya, secara pasti sarana dan prasarana yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sarana dan Prasarana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser saat ini antara lain tercermin dalam aset yang dimiliki. Lihat Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Ketersediaan dan kondisi Sarana dan Prasarana Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	4	2 Rusak ringan
2	Motor	17	17 Baik
3	Lemari Arsip	9	3 Kurang Baik
4	Mesin Ketik	4	4 Rusak ringan
5	Komputer PC	19	11 Baik 3 Rusak Berat 3 Kurang Baik
6	Printer	28	4 Rusak Berat
7	Laptop	10	10 Baik
8	White Board	3	3 Baik
9	Meja Rapat	7	2 Rusak Berat
10	Kursi Rapat	20	5 Rusak Berat
11	Meja Kerja	30	4 Kurang Baik
12	Kursi Kerja	25	25 Baik
13	Mesin Facsimile	2	2 Rusak Berat
14	Pesawat Telephone	2	Rusak
15	GPS	1	Baik
16	Genset	1	Rusak

17	AC	6	3 Kurang Baik
18	Kursi Plastik	51	15 Rusak Berat
19	Handy cam	1	Baik
20	Mesin Rumput	1	1 Rusak

3. Keadaan Umum Wilayah

3.1. Geografis

Kabupaten Paser terletak dibagian paling selatan wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Kabupaten Paser terletak pada posisi $0^{\circ} 48' 29,44''$ – $2^{\circ} 37' 24,21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0,77''$ - $118^{\circ} 1' 19,82''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $\pm 11.603,94$ km².

Batas wilayah administrasi Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Timur : Perbatasan dengan Penajam Paser Utara dan Selat Makasar.

Jarak ibukota kecamatan yang terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Muara Komam yang berjarak \pm 86 Km disusul ibukota Kecamatan Long Kali dengan jarak \pm 77 Km dari Tanah Grogot yang merupakan ibukota Kabupaten Paser. Sedangkan ibu kota kecamatan terdekat ke ibukota Kabupaten adalah Paser Belengkong dengan jarak \pm 5 Km.

Kabupaten Paser secara administrasi terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 139 Desa.

3.2. Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Paser tahun 2022 terus mengalami peningkatan sekitar 0,78% dibanding tahun 2021 yang saat itu berjumlah 280.065 jiwa. Penduduk Kabupaten Paser tahun 2021 sekitar 277.602 jiwa, dengan luas wilayah seluas 11.603,94 Km², sehingga kepadatan penduduk sebesar 23,92 jiwa/Km² atau dengan kata lain setiap 1 Km² dihuni oleh 23 - 25 orang.

3.3. Sumberdaya Lahan

Lahan yang telah dipergunakan untuk usaha tani baik padi, palawija, hortikultura dan perkebunan dapat dikatakan masih minim. Untuk lahan sawah sebesar 6.659 Ha baik untuk satu kali tanam, lahan pertanian sebesar 19.874 Ha.

Potensi yang dapat dikembangkan masih sangat luas. Prosentase lahan yang sudah dikembangkan masih kurang dibandingkan luas wilayah Kabupaten Paser yaitu

sebesar 0,23%, sehingga sangatlah memungkinkan untuk pengembangan lahan yang ada.

3.4. Komoditi Pertanian

Komoditi tanaman yang masuk dalam tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser terdiri dari semua jenis komoditi tanaman pangan dan tanaman hortikultura.

Tanaman pangan terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Untuk tanaman hortikultura terdiri tanaman sayuran semusim, buah-buahan, Biofarmaka dan tanaman hias. Komoditi yang menjadi komoditi utama tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai sedangkan untuk komoditi hortikultura adalah alpukat, jeruk, pisang, kelengkeng, durian, jambu, cempedak, lai, duku yang termasuk dalam program paser berbuah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dalam bab perencanaan kinerja memuat gambaran umum Rencana Strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Paser adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021 –2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Paser merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.

1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria **"SMART"**, yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a). Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi Tolak Ukur sasaran adalah Produksi Padi, Palawija dan Tanaman Hortikultura, untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Jumlah Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura

- b). Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

Berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi tolak ukur adalah

1. Nilai evaluasi Sakip dan APIP
2. Indeks kepuasan layanan sekretariat

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian visi dan misinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser harus memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan subsektor pertanian periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah dan subsektor pertanian. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan,

rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor pertanian. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Renstra tahun 2021-2026:

Strategi pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

Pertama Strategi S - O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi pertama ini mencakup:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan aparat sejalan dengan implementasi perundang-undangan yang berlaku
2. Membangun dan mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berbasis agribisnis
3. Membangun jejaring pemasaran.

Kedua Strategi W - O, yaitu strategi untuk menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi yang kedua ini mencakup:

1. Mendorong peningkatan pendanaan pengembangan komoditi pertanian melalui dana bantuan keuangan Provinsi dan APBN
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana pengairan
3. Mengembangkan jejaring kerja untuk meningkatkan ketersediaan saprodi
4. Pengembangan agribisnis dan industrialisasi pertanian.

Ketiga Strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pemenuhan ketahanan pangan daerah
2. Peningkatan daya saing produk pertanian
3. Pengendalian hama terpadu dan identifikasi iklim sejak dini
4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai RTRW.

Keempat Strategi W - T, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pengembangan pola tanam spesifikasi lokasi
2. Pemanfaatan varietas unggul tahan serangan penggangu tanaman

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2023 dan bertujuan untuk (menginventarisasi permasalahan pembangunan), mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dapat dilihat pada lampiran I.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam penjabaran dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Paser pada hakekatnya adalah merupakan uraian dari Misi dan Visi dari Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan Isu-Isu strategis yang harus dituntaskan selama 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi kepala daerah tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang disertai indikator kinerja yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan.

Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD idealnya yang tertuang pada Renstra SKPD, namun mengingat keuangan daerah yang tersedia dan Pagu yang disediakan untuk SKPD terbatas maka indikator tersebut hanya berdasarkan capaian keuangan yang tersedia.

Ada spesifikasi pada SKPD tertentu seperti halnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , indikator outcome ada yang tidak dapat terlihat secara langsung, karena berdasarkan musim tanam dan akan terlihat pada musim tanam yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Paser, maka telah dibuat Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 yang disepakati kedua belah pihak. (dapat terlihat pada Lampiran).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah Kabupaten Paser.

A. CAPAIAN KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Untuk penentuan capaian *Indikator Kinerja Kegiatan* (input, output dan outcome), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator yang menunjukkan *outcome* diberi bobot lebih tinggi dari output dan input. Begitu juga selanjutnya indikator input diberi bobot lebih besar dari proses dan output;
2. Indikator menjadi tanggung jawab utama dari instansi dan dapat dikendalikan (*controlable*) diberi bobot lebih tinggi dari pada indikator yang tidak dapat dikendalikan (*Uncontrollable*);
3. Kegiatan yang lebih utama dan erat kaitannya dalam pencapaian visi, misi serta memiliki bobot kinerja yang lebih besar ditinjau sari resiko pencapaian maupun dana yang ada, diberi bobot lebih tinggi dari kegiatan lain.

Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja baik input, output dan outcome dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Indikator Masukan (INPUTS)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut baik Kepala Dinas, Kepala Bidang / Kasi/ beserta staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik komputer, kendaraan, LCD (infocus) sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilakukan atas indikator inputs baik dari rencana pengalokasian yang dilakukan dibandingkan dengan realisasi baik dari ketepatan pengalokasian maupun ketepatan dengan sumber daya yang tersedia.

Nilai capaian indikator inputs diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan rencana, dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

1.2. Indikator Keluaran (OUTPUTS)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik, contohnya berupa buah bangunan yang terlaksana, jumlah orang yang dikirim dalam diklat dan sebagainya.

Nilai capaian indikator outputs diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan rencana, dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

1.3. Indikator Hasil (OUTCOMES)

Indikator Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), contohnya antara lain meningkatnya pemahaman terhadap materi penyuluhan yang disampaikan atau atau berkurangnya keluhan masyarakat akan pelayanan yang dilakukan pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , meningkatnya pendapatan petani dan sebagainya.

Nilai capaian indikator outcomes diperoleh dengan dua cara yaitu pertama, membandingkan realisasi dengan rencana, dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik, dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kedua dengan asumsi semakin tinggi nilai pencapaian semakin rendah nilai kinerja, hal ini terutama berhubungan dengan keluhan masyarakat dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menggambarkan keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser secara keseluruhan dengan menggunakan rumus :

- **Sasaran 1 : Persentase Meningkatnya produksi dan produktifitas Padi, palawija dan hortikultura**

Persentase Peningkatan produksi dan produktifitas padi	= 1,44 %
Persentase Peningkatan produksi dan produktifitas palawija	= 5,33 %
Persentase Peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura	= 2,81 %

Berdasarkan Sasaran yang tertuang pada Renstra yaitu Persentasi Peningkatan Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura ada data produksi padi mengalami penurunan produksi sebesar 49,26% atau sebanyak 25.603,04 Ton yaitu Pada Tahun dasar Renstra yaitu Tahun 2021 sebesar 51.972,06 ton menjadi 26.369,02 ton pada tahun 2023 hal ini disebabkan karena adanya beberapa Kecamatan yang mengalami banjir pada awal tahun 2023 yaitu pada saat padi sudah pada fase generatif sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan padi, selain itu juga ada

nya perubahan cuaca ekstim El-Nino yang menyebabkan kekeringan hampir 6 bulan, pada tanaman padi ladang mengalami penurunan karena pada umumnya masyarakat menanam di sela kelapa sawit.

Untuk tanaman palawija juga mengalami penurunan produksi sebesar 5.275,73 Ton yaitu pada tahun Dasar Renstra yaitu tahun 2021 sebesar 9.422,41 Ton Menjadi 4.146,68 Ton pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena banyaknya serangan hama pada tanaman jagung yaitu monyet menyebabkan petani memanen muda tanaman jagung, begitu pula dengan ubi kayu dan ubi jalar dikarenakan pemasarannya yang kurang dari segi harga, dan juga adanya cuaca ekstim El-Nino yang menyebabkan kurangnya persediaan air

Sedangkan untuk komoditas hortikultura mengalami peningkatan sebesar 45.429,96 Ton, yaitu pada tahun dasar Renstra yaitu Tahun 2021 sebesar 15.035,10 Ton dan pada tahun 2023 sebesar 60.465,06 Ton, peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan beberapa komoditas unggulan yaitu Kelengkeng, Jeruk Pamelon, Jeruk Nipis, Sereh, Buah Naga, sehingga dapat mendongkrak nilai produksi tahun 2023, adapun data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi padi	52.849,00	48.202,66	53.189,20	26.369,02
Produksi Palawija	11.593,41	9.009,73	11.872,5	4.146,68
Produksi hortikultura	13.194,31	38.085,84	13.414,42	60.465,06

- **Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja organisasi yang akuntabel**

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks kepuasan layanan sekretariat} &= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jml Responden} \times \text{Jml Unsur}} = 100\% \\
 &= \frac{1.595}{32 \times 15} \times \frac{100}{4} \\
 &= 83,07\%
 \end{aligned}$$

Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja organisasi yang akuntabel terdapat indikator Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Target Tahun 2023 pada renstra adalah 72% sedangkan Realisasi Indeks Kepuasan Tahun 2023 adalah 83,07% sehingga bisa dibilang berhasil, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat diikuti oleh 32 responden dari Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sangat berhasil. Analisis yang dilakukan hanya terhadap program sebagai induk dari kegiatan. Adapun jumlah program yang dilakukan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sebanyak 5 (lima) program.

a. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan (Analisis Formulir PKK).

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan yang diperoleh tahun 2023 cukup berhasil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.205.722.384,- (91,23%) dari pagu sebesar Rp. 19.955.559.639,- dari kegiatan yang ada. Penjabaran dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 292.405.686,- (99,15%) dari pagu Rp. 294.925.000,- dan realisasi fisik mencapai 100%.
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dana yang terserap sebesar Rp. 234.845.868,- (99,34%) dari pagu dana sebesar Rp. 236.415.000,- dan realisasi fisik tercapai 100%.
 - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dana yang terserap sebesar Rp. 935.000,- (100%) dari pagu dana sebesar Rp. 935.000,- dan realisasi fisik tercapai 100%.
 - Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, dana yang terserap sebesar Rp. 56.625.000,- (98,35%) dari pagu sebesar Rp. 57.575.000,- dan realisasi fisik tercapai 100%.

- Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 16.929.859.647,- (90,97%) dari pagu sebesar Rp. 18.609.519.226,-. Dari kegiatan keseluruhan dapat terealisasi 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dana terserap sebesar Rp. 16.839.945.047,- (90,93%) dari pagu Rp. 18.519.519.226,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dana terserap sebesar Rp. 89.914.600,- (99,91%) dari pagu Rp. 90.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 570.695.964,- (92,75%) dari pagu sebesar Rp. 615.293.400,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dana terserap sebesar Rp. 1.720.100,- (99,68%) dari pagu sebesar Rp. 1.725.600,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dana terserap sebesar Rp. 257.614.000,- (92,53%) dari pagu sebesar Rp. 278.403.300,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, dana yang terealisasi sebesar Rp. 98.091.600,- (86,71%) dari

pagu sebesar Rp. 113.125.000 dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dana yang terealisasi sebesar Rp. 24.396.000,- (97,10%) dari pagu sebesar Rp. 25.124.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.950.000,- (65,26%) dari pagu sebesar Rp. 2.988.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dana yang terealisasi sebesar Rp. 186.924.264,- (96,39%) dari pagu sebesar Rp. 193.927.500,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 288.515.078,- (96,30%) dari pagu sebesar Rp. 299.592.213,- dan realisasi fisik mencapai 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dana yang terealisasi sebesar Rp. 61.963.400,- (99,95%) dari pagu sebesar Rp. 61.995.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dana terserap sebesar Rp. 33.396.613,- (75,91%) dari pagu sebesar Rp. 43.997.233,- dan realisasi fisik sebesar 100%, rendahnya serapan dari

kegiatan ini dikarenakan untuk pemakaian beban listrik telah berkurang.

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dana yang terserap sebesar Rp. 193.155.065,- (99,77) dari pagu sebesar Rp. 193.599.980,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 124.246.009,- (91,20%) dari pagu sebesar Rp. 136.229.800,- dan realisasi fisik mencapai 100%
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan, dana yang terserap sebesar Rp. 121.746.009,- (91,04%) dari pagu sebesar Rp. 133.729.800,- dan realisasi fisik sebesar 100%
 - Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dana yang terserap sebesar Rp. 2.500.000,- (100%) dari pagu sebesar Rp. 2.500.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dana yang terserap 648.000,- (64,80%) dari pagu Rp. 1.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Nilai capaian realisasi pada Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dari sisi keuangan yang terserap sebesar Rp. 11.205.483.340,- (90,60%) dari pagu Rp. 12.367.907.855,- dengan jumlah kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Penjabaran dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan realisasi dana sebesar Rp. 11.205.483.340,- (90,60%) dari pagu dana sebesar Rp. 12.367.907.855,- dan realisasi fisik 100%.
- Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dana yang terserap sebesar Rp. 11.045.338.542,- (90,55%) dari pagu sebesar Rp. 12.198.507.855,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dana yang terserap sebesar Rp. 160.114.798,- (94,54%) dari pagu sebesar Rp. 169.400.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Jumlah kegiatan pada program ini sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.214.761.322,- (95,73%) dari pagu dana sebesar Rp. 108.867.086.188,-. Penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- Kegiatan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan dana yang terserap sebesar Rp. 1.282.190.225,- (87,41%) dari pagu dana Rp. 1.466.900.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B, dana yang terserap sebesar Rp. 656.173.900,- (98,94%) dari pagu sebesar Rp. 663.205.920,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, dana yang terserap sebesar Rp. 88.112.700,- (61,75%) dari pagu sebesar Rp. 142.700.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%
- Kegiatan pembangunan prasarana pertanian terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan dana yang terserap sebesar Rp. 102.932.571.097,- (95,84%) dari pagu dana Rp. 107.400.186.188,- dan realisasi fisik mencapai sebesar 100%.
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, dana yang terserap sebesar Rp. 2.712.167.475,- (94,43%) dari pagu sebesar Rp. 2.872.200.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Embung Pertanian, dana yang terserap sebesar Rp. 688.288.075,- (97,63%) dari pagu sebesar Rp. 705.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, dana yang terserap sebesar Rp. 100.088.668.872,- (95,88%) dari pagu sebesar Rp. 104.386.886.188,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit, dana yang terserap sebesar Rp. 273.600,- (9,50%) dari pagu sebesar Rp. 2.500.000,- kecilnya realisasi keuangan di karenakan tidak adanya paket fisik untuk DAM parit, sehingga pendampingannya juga tidak dilaksanakan.
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Long Stroge, dana yang terserap sebesar Rp. 415.800,- (16,63%) dari pagu sebesar Rp. 2.500.000,- hal ini disebabkan karena tidak adanya paket Fisik Long Storage sehingga untuk pendampingannya tidak dilaksanakan
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air, dana yang terserap sebesar Rp. 131.497.150,- (94,88%) dari pagu sebesar Rp. 138.600.000,- realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dana yang terserap sebesar Rp. 243.056.325,- (97,65%) dari pagu sebesar Rp. 248.900.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.669.998,- (96,73%) dengan pagu dana sebesar Rp. 163.000.000,-. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi dana sebesar 157.669.998,- (96,73%) dengan pagu dana sebesar Rp. 163.000.000,-. dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp. 157.669.998,- (96,73%), dari pagu dana sebesar Rp. 163.000.000- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan Penanggulan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dana yang terserap sebesar Rp. 3.012.340.370,- (90,65%), dari pagu dana sebesar Rp. 3.322.895.700,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.814.218.933,- (93,92%) dengan pagu dana sebesar Rp. 8.319.982.905,-. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan realisasi dana sebesar Rp.

- 7.814.218.933,- (93,92%) dari pagu sebesar Rp. 8.319.982.905,-. dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, dana yang terserap sebesar Rp. 368.237.417,- (96,34%) dari pagu sebesar Rp. 382.230.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, dana yang terserap sebesar Rp. 1.191.322.200,- (85,86%) dari pagu sebesar Rp. 1.387.500.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, dana yang terserap sebesar Rp. 6.254.659.316,- (95,49%) dari pagu sebesar Rp. 6.550.099.905,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 332.064.620,- (95,30%) dengan pagu dana sebesar Rp. 348.456.390,-. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian realisasi dana sebesar 332.064.620,- (95,30%) dengan pagu dana sebesar Rp. 348.456.390,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

1. Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran Pencapaian Sasaran merupakan pengukuran tingkat capaian yang diperoleh selama tahun 2023. Penekanan sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser adalah : Meningkatnya produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser ada beberapa yang dapat terlihat dan dianalisis yaitu dari hasil produksi dan produktivitas beberapa komoditi, sedangkan sasaran yang lain sulit atau tidak dapat di ukur secara langsung.

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil bahwa pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 senilai 94,54 % hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2023 dinilai **Berhasil**. Keberhasilan ini merupakan kerjasama dan dukungan semua pegawai serta pihak yang terkait dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, namun demikian masih ditemui berbagai kendala yang di alami dalam melaksanakan kegiatan.

2. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran belanja pembangunan tahun 2022 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sebesar :

1). Belanja Operasi	:	Rp.	142.061.641.276,-
2). Belanja Modal	:	Rp.	12.240.494.401,-
Realisasi	:	Rp.	145.874.669.122,-
Prosentase Realisasi	:		94,54%
Fisik	:		95%

Operasional tersebut digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan PNS dan Kegiatan Operasioanl Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, sedangkan Belanja Modal digunakan untuk belanja penunjang kegiatan Operasional yang masuk dalam Aset Dinas, semua Belanja tersebut tertuang dalam DPA pada 5 Program, 10 Kegiatan Urusan Pilihan dan 28 Sub Kegiatan. Adapun rincian alokasi anggaran setiap program dan kegiatan beserta realisasinya tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Paser Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENJA		REALISASI CAPAIAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI (%)	
		2023		2023		2023	
		(5)		(6)		(7)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	19.956.559.639	83,07	18.206.370.384	100	91.23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan baik (%)	100	294.925.000	100	292.405.686	100	99,15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peencanaan Perangkat Daerah	5	236.415.000	5	234.845.686	100	99,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKJiP	1	935.000	1	935.000	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	57.575.000	4	56.625.000	100	98.35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100	18.609.519.226	100	16.929.859.847	100	90.97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1554	18.519.519.226	1554	16.839.945.047	100	90.93

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	90.000.000	300	89.914.600	100	99,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	615.293.400	100	570.695.964	100	92,75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi atau Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16	1.725.600	16	1.720.100	100	99,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28	278.403.300	28	257.614.000	100	92,53
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	113.125.000	3	98.091.600	100	86,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	25.124.000	3	24.396.000	100	97,10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	354	2.988.000	354	1.950.000	100	65,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	66	193.927.500	66	186.924.264	100	96,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100	299.592.213	100	288.515.078	100	96,30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	61.995.000	1	61.965.400	100	99,95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	43.997.233	12	33.396.613	100	75,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan	1	193.599.980	1	193.155.065	100	99,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100	137.229.800	100	124.894.009	100	91,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dirbayarkan pajak perizinannya	7	133.729.800	7	121.746.009	100	91,04
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	2.500.000	4	2.500.000	100	100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	1000.000	2	648.000	100	64.80
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana tanam dan pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100	12.716.364.245	100	11.537.547.960	100	90.73
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	12.716.364.245	100	11.537.547.960	100	90.73
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	136	12.198.507.855	136	11.045.338.542	100	90.55
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	40	517.856.390	40	492.209.418	100	95,05
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang di manfaatkan	100	109.823.486.188	100	105.146.521.477	100	95.74
Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	100	1.466.900.000	100	1.282.190.225	100	87.41
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LPC2B yang dikelola	2	1.324.200.000	2	1.142.793.275	100	90.17
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	2	142.700.000	2	88.112.700	100	61.75
Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pendukung pertanian	88	108.356.586.188	84	103.864.331.252	100	95.45
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	2.872.200.000	2	2.712.167.475	100	94.43
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	705.000.000	2	688.288.075	100	97,63
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	80	104.386.886.188	76	100.088.668.827	100	95.88

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	2500.000	0	237.600	0	9,50
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	2500.000	0	415.800	0	16,63
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	138.600.000	2	131.497.150	100	94,88
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	248.900.000	1	243.056.325	100	97,65
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%)	10	3.485.895.700	5,5	3.170.010.368	100	90,94
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	3.485.895.700	100	3.170.010.368	100	90,94
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	10	163.000.000	10	157.669.998	100	96,73
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan)	2	3.322.895.700	2	3.012.340.370	2	90,65
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh (%)	62	8.319.829.905	62	7.814.218.933	100	93,92
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian (%)	100	8.319.829.905	100	7.814.218.933	100	93,92
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	6	382.230.000	6	368.237.417	100	96,34
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	11	1.387.500.000	11	1.191.322.200	100	85,86
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	41	6.550.099.905	41	6.254.659.316	100	95,49

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2022. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999, dan diperbaharui melalui Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2023 ini adalah kendala teknis, seperti waktu yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan pada suatu kegiatan, dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sumber Daya Manusia yang belum maksimal dan adanya pemenuhan Indikator Kinerja yang sering terlambat dikarenakan harus berkoordinasi dengan Instansi lain seperti BPS.

Penyusunan LKjIP 2023 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :

- Beberapa unsur indikator input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif

bagi yang membaca. Untuk yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.

Meskipun demikian berkat kerja keras serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKjIP Tahun 2023 ini dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dengan Laporan LKjIP ini diharapkan dapat mengacu pelaksanaan pemerintahan yang baik yang melibatkan *stakeholders*, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ERWAN WAHYUDI, SP. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Kabupaten Paser

Dr. ERWAN WAHYUDI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Padi, Palawija dan Hortikultura	Persentase meningkatnya produksi padi	1,44
		Persentase meningkatnya produksi palawija	5,33
		Persentase meningkatnya produksi hortikultura	2,81
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Dan APIP	67

Program	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.956.559.639	APBD Kab.
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.716.364.245	APBD Kab.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	109.823.486.188	APBD Kab. Dan Bankeu Prov.
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.485.895.700	APBD Kab.
Program Penyuluhan Pertanian	8.319.829.905	APBD Kab. Dan DAK Non Fisik
TOTAL	154.302.135.677	

Tana Paser, Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser



Dr. ERWAN WAHYUDI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

PENJELASAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN PENJELASAN INDIKATOR
1. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	Persentase Meningkatnya Produksi Padi	Presentase Peningkatan Produksi Padi adalah Persentase dari Jumlah Produksi Padi Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Padi Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021) Jumlah Produksi Padi di dapat dari Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan
	Persentase Meningkatnya Produksi Palawija	Presentase Peningkatan Produksi Palawija adalah Persentase dari Jumlah Produksi Palawija Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Palawija Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021). Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan.
	Persentase Meningkatnya Produksi Hortikultura	Presentase Peningkatan Produksi Hortikultura adalah Persentase dari Jumlah Produksi Hortikultura Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Hortikultura Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021). Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan.
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Penilaian SAKIP sebagai indikator dalam melihat bagaimana mengetahui implemantasi atas SAKIP serta tingkat akuntabilitas kinerja. Melalui penilaian SAKIP Pemerintah dapat mengukur dan memantau kinerja organisasi secara lebih terstruktur dan obyektif. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Instansi : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura				150.021.839.977	141.929.920.597	94,61	
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				19.955.559.639	18.205.722.384	91,23	
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				294.925.000	292.405.686	99,15	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Input : - Dana : Rp 236.415.000 - SDM :	Rp	236.415.000	234.845.686	99,34	
		Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	100	
		OutCame : Tersedianya data tanaman pangan dan hortikultura	Bulan	12	12	100	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input : - Dana : Rp 935.000 - SDM :	Rp	935.000	935.000	100,00	
		Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Input : - Dana : Rp 57.575.000 - SDM :	Rp	57.575.000	56.625.000	98,35	
		Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	Dokumen	4	4	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.609.519.226	16.929.859.647	90,97	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Input : - Dana : Rp 18.519.519.226 - SDM :	Rp	18.519.519.226	16.839.945.047	90,93	
		Output : Jumlah orang yang menerima gajidan tunjangan ASN	Orang	1554	1554	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Input : - Dana : Rp 90.000.000 - SDM :	Rp	90.000.000	89.914.600	99,91	
		Output : penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	300	300	100	
		OutCame : Terselenggaranya pelaksanaan keuangan OPD	Bulan	12	12	100	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Input :			615.293.400	570.695.964	92,75
		- Dana : Rp 1.725.600	Rp	1.725.600	1.720.100	100	
		- SDM :					
		Output : Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	16	16	100	
		OutCome : Terlaksananya penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input :				
	- Dana : Rp 278.403.300	Rp	278.403.300	257.614.000	93		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	28	28	100,00		
	OutCome : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Input :					
	- Dana : Rp 113.125.000	Rp	113.125.000	98.091.600	86,71		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,00		
	OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input :					
	- Dana : Rp 25.124.000	Rp	25.124.000	24.396.000	97		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Paket	3	3	100,00		
	OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input :					
- Dana : Rp 2.988.000	Rp	2.988.000	1.950.000	65,26			
- SDM :							
Output : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	354	354	100,00			
OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00			
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input :						
- Dana : Rp 193.927.500	Rp	193.927.500	186.924.264	96,39			
- SDM :							
Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Laporan	66	66	100,00			
OutCome : Terpadunya program dengan baik	%	100	100	100,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.592.213	288.515.078	96,30	
Penyediaan jasa surat menyurat	Input :						
- Dana : Rp 61.995.000	Rp	61.995.000	61.963.400	99,95			

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- SDM :					
		Output : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100,00	
		OutCome : Terselenggaranya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100,00	
		Input :					
		- Dana : Rp 43.997.233	Rp	43.997.233	33.396.613	75,91	
		- SDM :					
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	
		OutCome : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00	
		Input :					
		- Dana : Rp 193.599.980	Rp	193.599.980	193.155.065	99,77	
		- SDM :					
		Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	OutCome : Terselenggaranya pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	100,00	
		Input :					
		- Dana : Rp 133.729.800	Rp	133.729.800	121.746.009	91,04	
		- SDM :					
		Output : Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dirbayarkan pajak perijinannya	Unit	7	7	100,00	
		OutCome : Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas	Bulan	12	12	100,00	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Input :					
		- Dana : Rp 2.500.000	Rp	2.500.000	2.500.000	100,00	
- SDM :							
Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	4	4	100,00		
OutCome : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor		Bulan	12	12	100,00		
Input :							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana : Rp 1.000.000	Rp	1.000.000	648.000	64,80		
	- SDM :						
	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	2	2	100,00		
	OutCome : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Input :						
	- Dana : Rp 1.000.000	Rp	1.000.000	648.000	64,80		
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				12.367.907.855	11.205.483.340	90,60	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Input :			12.367.907.855	11.205.483.340	90,60
		- Dana : Rp 12.198.507.855	Rp	12.198.507.855	11.045.338.542	90,55	
		- SDM :					
		Output : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Laporan	136	136	100,00	
		OutCame : Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	100	100,00	
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Input :					
		- Dana : Rp 169.400.000	Rp	169.400.000	160.144.798	94,54	
		- SDM :					
		Output : Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	40	40	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	%	100	100	100,00	
			108.867.086.188	104.214.761.322	95,73		
			1.466.900.000	1.282.190.225	87,41		
Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Input :						
	- Dana : Rp 1.324.200.000	Rp	1.324.200.000	1.194.077.525	90,17		
	- SDM :						
	Output : Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LPC2B yang dikelola	Dokumen	2	2	100,00		
		OutCame : Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian	%	100	100	100,00	
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B	Input :					
- Dana : Rp 142.700.000		Rp	142.700.000	88.112.700	61,75		
- SDM :							
Output : Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B		Dokumen	2	2	100,00		
	OutCame : Terselenggaranya penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B	%	100	100	100,00		
			107.400.186.188	102.932.571.097	95,84		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Input :					
		- Dana : Rp 2.872.200.000	Rp	2.872.200.000	2.712.167.475	94,43	
		- SDM :					
		Output : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun,	Unit	2	2	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	%	100	100	100,00		

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
IV. Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	Input :					
		- Dana : Rp	705.000.000	Rp	705.000.000	688.288.075	97,63
		- SDM :					
		Output : Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	2	2	100,00
		OutCame : Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani		%	100	100	100,00
		Input :					
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	- Dana : Rp	104.386.886.188	Rp	104.386.886.188	100.088.668.872	95,88
		- SDM :					
		Output : Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	80	76	95,00
		OutCame : Terpeliharanya jalan usaha tani		%	100	100	100,00
		Input :					
		- Dana : Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	237.600	9,50
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit	- SDM :					
		Output : Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	1	1	100,00
		OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage	Input :					
		- Dana : Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	415.800	16,63
		- SDM :					
		Output : Jumlah long storage yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	1	1	100,00
		OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00
		Input :					
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	- Dana : Rp	138.600.000	Rp	138.600.000	131.497.150	94,88	
	- SDM :						
	Output : Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	2	2	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00	
	Input :						
	- Dana : Rp	248.900.000	Rp	248.900.000	243.056.325	97,65	
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	- SDM :						
	Output : Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	1	1	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00	
				163.000.000	157.669.998	96,73	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Input :			163.000.000	157.669.998	96,73
		- Dana : Rp	163.000.000	Rp	163.000.000	157.669.998	96,73
		- SDM :					
		Output : Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		Ha	10	10	100,00
		OutCame : Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		%	100	100	100,00
	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Input :					
		- Dana : Rp	3.322.895.700	Rp	3.322.895.700	3.012.340.370	90,65
		- SDM :					
Output : Jumlah Penanggulangan pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			Laporan	2	2	100,00	
	OutCame :		%	100	100	100,00	
V. Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Input :			8.319.829.905	7.814.218.933	93,92
		- Dana : Rp	382.230.000	Rp	382.230.000	368.237.417	96,34
		- SDM :					
		Output : Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit	6	6	100,00
		OutCame : Cakupan pendampingan dan penyuluhan		%	100	100	100,00
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Input :					
		- Dana : Rp	1.387.500.000	Rp	1.387.500.000	1.191.322.200	85,86
		- SDM :					
Output : Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya			Unit	11	11	100,00	
	OutCame : Cakupan pendampingan dan penyuluhan		%	100	100	100,00	
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan	Input :						
	- Dana : Rp	6.550.099.905	Rp	6.550.099.905	6.254.659.316	95,49	
	- SDM :						
	Output : Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		Unit	41	41	100,00	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
UPT Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	OutCome : Cakupan pendampingan dan penyuluhan	%	100	100	100,00		
					348.456.390	332.064.620	95,30	
					348.456.390	332.064.620	95,30	
					348.456.390	332.064.620	95,30	
			Input :					
			- Dana : Rp 348.456.390	Rp	348.456.390	332.064.620	95,30	
	- SDM :							
	Output :	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Bulan	12	12	100,00		
	OutCome :	Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		



Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19781230 200801 1 006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2023)	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
I	Meningkatnya produksi dan Produktifitas padi, palawija dan hortikultura							
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		100%	25	25	25	25	
1.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	25	25	25	25	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	45 Laporan	5	5	25	10	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	40 Laporan	5	5	20	10	
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	25	25	25	25	
2.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	100%	25	25	25	25	
	Pengelolaan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0	0	1	0	
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	1 Dokumen	0	0	1	0	
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	51 Unit					
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	0	0	1	1	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Dirahabilitasi dan Dipelihara	48 Unit	5	8	25	10	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0	0	2	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0	0	1	0	

NO.	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2023)	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Program Pengendalian Dan penanggulangan Bencana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	10%	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	25	25	25	25	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	1	1	5	3	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Laporan	0	0	1	1	
	Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	60%	15	15	15	15	
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	25	25	25	25	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	0	0	5	0	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	0	2	5	3	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	14 Unit	1	1	8	4	
II	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	80%	20	20	20	20	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	25	25	25	25	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2	1	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan Laporan LKJIP	1 Dokumen	1	0	0	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1	1	1	1	

NO.	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2023)	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%	25	25	25	25	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111 Orang	√	√	√	√	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	200 Dokumen	50	50	50	50	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	25	25	25	25	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Paket	1	2	2	1	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	1	1	1	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	0	1	1	1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	348 Dokumen	25	50	200	73	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56 Laporan	10	10	26	10	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	25	25	25	25	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	0	1	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	0	0	1	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	25	25	25	25	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	7 Unit	0	1	5	2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	0	0	2	2	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049
TANA PASER

Nomor SOP : 065/353/SET

Kegiatan : Penyusunan LKjIP SKPD

A. UMUM

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama setahun di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Lakip / LKjIP disusun sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999, dan diperbaharui melalui Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
2. Kegiatan Penyusunan LAKIP / LKjIP SKPD memiliki misi untuk mendukung program pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser atas pelaksana kinerja yang telah dilaksanakan selama setahun yang meliputi program-program dan kegiatan-kegiatan tahun anggaran yang sudah berjalan.

B. PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT

1. Pengumpul Data

Petugas pengumpul data.

2. Penyusun LKjIP

Perencana Ahli Muda, seluruh Kepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Sekretaris dan Kepala Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049

TANA PASER

A. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan bidang	3 Hari
2.	Menerima berkas data dan informasi bidang	1 Hari
3.	Mengolah data dan informasi yang telah diterima	10 Hari
4.	Membuat draf buku LKjIP	10 Hari
5.	Mengoreksi dan memberi paraf draf buku LKjIP	1 Hari
6.	Menandatangani draf buku LKjIP	5 Menit
7.	Memperbanyak dan menjilid buku LKjIP	2 Hari
8.	Mengarsipkan dan mengirim buku LKjIP	60 Menit

B. FORMULIR / DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Laporan data dari masing-masing bidang

SOP LAKIP

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT	Nomor SOP	065/353/SET	
	Tgl Pembuatan	Februari 2023	
	Tgl Revisi		
	Tgl Efektif		
	Disahkan Oleh	 Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si Kepala Dinas Pembina NIP 19781230 200801 1 006	
Nama SOP	Penyusunan LKJIP OPD		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Permendagri No. 52 Tahun 2011, Tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Kepala Dinas
2	Peraturan Bupati Paser No. 10 Tahun 2011, Tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas dilingkungan Kab.Paser	2	Sekretaris
3	Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang LAKIP	3	Kepala Bidang
4	Keputusan Ketua LAN RI Nomor : 589/IX/6/V/199 diperbaharui Keputusan Ketua LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003	4	Perencana Ahli Muda
		5	Penatalaksana Perencanaan Program
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP LKJIP OPD	1	Laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD
		2	Laporan Kinerja Bidang
		3	Renstra dan Renja
		4	Komputer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1	(Hambatan / dampak)	1	Disimpan dalam bentuk Hard Copy /file

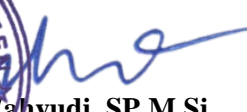
Prosedur Penyusunan LKjIP SKPD

NO	KEGIATAN						MUTU BAKU			KET
		Bidang /UPTD Lingkup SKPD	Penata laksana perenc.	Kasubbag Perencanaan & Program	Sekretaris	Kepala Dinas				
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan bidang						Arsip data dan informasi bidang	3 Hari	Data dan informasi bidang	
2	Menerima berkas data dan informasi bidang							1 Hari		
3	Mengolah data dan informasi yang telah diterima						Data realisasi fisik dan keuangan serta data statistik	10 Hari		
4	Membuat draf buku LKjIP						Komputer	10 Hari	draf buku LKjIP	
5	Mengoreksi dan memberi paraf draf buku LKjIP							1 Hari		
6	Menandatangani draf buku LKjIP							5 menit	Tanda Tangan	
7	Memperbanyak dan menjilid buku LKjIP							2 Hari	Buku LKjIP	
7	Mengarsipkan dan mengirim buku LKjIP							60 Menit		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi : **DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER**
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : 1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Tanaman pangan dan hortikultura serta penguatan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
2. Penetapan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas padi, palawija dan hortikultura	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Padi	Produksi padi tahun n	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Sarana Perizinan usaha tani, Bidang Prasarana dan Bidang Penyuluhan
		Peningkatan Produksi dan Produktifitas Palawija	Produksi palawija tahun n	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Sarana Perizinan usaha tani, Bidang Prasarana dan Bidang Penyuluhan
		Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura	Produksi hortikultura tahun n	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Sarana Perizinan usaha tani, Bidang Prasarana dan Bidang Penyuluhan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	$\frac{\text{Total nilai semua unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \times 100 \%$	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bagian Sekretariat
		Nilai Evaluasi SAKIP Dan APIP	Hasil reviu tim penilai SAKIP (Eksternal)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bagian Sekretariat

Kepala Dinas

Erwan Wahyudi, SP M.Si
Pembina
NIP. 19781230 200801 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan RA. Kartini Tana Paser Kode Pos 76211

Email : dis.tph.paser20@gmail.com

Website : <https://dtp.h.paserkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/50/SET

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/LKjIP
(PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) SKPD yang akurat, relevan dan lengkap sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, maka perlu dibentuk Tim untuk penyusunan tersebut;
 - b. Bahwa pembentukan tim penyusunan LAKIP/LKjIP SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Tugas-tugas Perbantuan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Paser;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP/LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dengan nama, jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diberikan pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
- a. Melakukan rekapitulasi terhadap kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan;
 - b. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang telah dilakukan rekapitulasinya; dan
 - c. Membuat laporan dan melaporkannya ke Pemerintah Daerah berbentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala,



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19781230 200801 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten
Paser
Nomor : 188.4/50/SET
Tanggal : 8 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/LKjIP
(PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota : 1. Kepala Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan
Usaha Pertanian
2. Kepala Bidang Prasarana
3. Kepala Bidang Penyuluhan
4. Herdiman
5. Anggih Irpandi, SE
6. Sriani, A.Md

Kepala,



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19781230 200801 1 006